

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS PENELITIAN

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Akuntansi

2.1.1.1 Pengertian Akuntansi

Soemarso (2010:3), mengungkapkan pengertian Akuntansi sebagai berikut:

“... proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi, untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut”.

Menurut *Accounting Principles Board* (APB) dan *American Institute of Certified Public Accountants* (AICPA) tahun 1970 dalam Hans Kartikahadi dkk (2016:3), yaitu:

“Accounting is a service activity, its function is to provide quantitative information, primarily financial in nature, about economic entities that is intended to be useful in making economic decisions, in making reasoned choices among alternative course of action”.

Jika diartikan APB dan AICPA menjelaskan akuntansi sebagai suatu aktivitas atau kegiatan pelayanan, yang fungsinya terutama untuk memberikan informasi kuantitatif, terutama bersifat keuangan dari suatu entitas ekonomi dengan

maksud berguna untuk pengambilan keputusan ekonomi, dalam memilih secara bijak diantara alternatif tindakan.

Menurut Agoes dan Trisnawati (2012:1), akuntansi adalah : “... Sistem Informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan”.

Adapun pengertian menurut Sasongko Catur dkk (2017:2), Pengertian Akuntansi adalah:

“... Proses/ aktivitas yang menganalisis, mencatat, mengklasifikasikan, mengikhtisarkan, melaporkan dan menginterpretasikan informasi keuangan untuk kepentingan para penggunanya”.

Berdasarkan dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa akuntansi merupakan proses atau aktivitas yang mengidentifikasi, mengukur, menganalisis, mencatat, mengklasifikasikan, mengikhtisarkan, melaporkan dan menginterpretasikan informasi keuangan, untuk kepentingan pihak-pihak yang membutuhkan/ menggunakan informasi tersebut dalam pengambilan keputusan secara bijak diantara alternatif tindakan.

2.1.1.2 Bidang-Bidang Akuntansi

Menurut Waluyo (2012:34), bidang-bidang akuntansi terbagi menjadi 7 (tujuh) bagian yaitu:

1. Akuntansi Keuangan (*Financial Accounting*)
Akuntansi ini berhubungan dengan unit ekonomi secara keseluruhan dalam bentuk laporan keuangan yang dimanfaatkan oleh berbagai pihak dalam pengambilan keputusan yang didasarkan pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku.

2. Akuntansi Pemeriksaan (*Auditing*)
Akuntansi ini berkaitan dengan pemeriksaan terhadap laporan keuangan yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan dengan tujuan agar informasi akuntansi dapat dipercaya, menguji ketaatan terhadap kebijakan, prosedur, peraturan yang berlaku, serta memiliki daya guna suatu aktivitas bisnis.
3. Akuntansi Manajemen (*Management Accounting*)
Akuntansi ini ruang lingkungannya berfokus pada informasi untuk manajemen perusahaan yang bertujuan mengendalikan kegiatan perusahaan dan menilai alternatif dalam pengambilan keputusan.
4. Akuntansi Biaya (*Cost Biaya*)
Akuntansi ini berfokus pada penetapan dan pengendalian biaya, sebagai fungsi utama akuntansi biaya yaitu mengumpulkan data biaya, menganalisis data biaya, baik yang telah terjadi maupun yang akan terjadi, yang digunakan oleh pihak manajemen sebagai alat pengendalian kegiatan dan menyusun rencana biaya di masa datang.
5. Akuntansi Pemerintah (*Governmental Accounting*)
Akuntansi ini berfokus pada pencatatan dan pelaporan atas transaksi-transaksi yang terjadi dalam ruang lingkup pemerintah dan mencakup aspek pengendalian atas pengeluaran dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Barang Negara.
6. Akuntansi Pajak (*Tax Accounting*)
Dalam menetapkan besaran pajak terhutang tetap mendasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan, mengingat dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan terdapat aturan-aturan khusus yang berkaitan dengan akuntansi.
7. Sistem Informasi Akuntansi (*Accounting Information System*)
Sistem informasi akuntansi menyiapkan informasi keuangan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Bidang-bidang akuntansi dibagi menjadi beberapa bidang, dalam penelitian ini bidang akuntansi yang akan digunakan oleh penulis yaitu Akuntansi Perpajakan.

2.1.2 Pelaporan Keuangan

2.1.2.1 Pengertian Laporan Keuangan

Laporan Keuangan untuk kepentingan perpajakan disebut laporan keuangan fiskal, sedangkan untuk kepentingan umum disebut dengan laporan keuangan komersial. Berikut pengertian-pengertian laporan keuangan komersial:

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) No 1 (2015:1.3) pengertian laporan keuangan, yaitu suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas.

Menurut Hery (2013:19), menjelaskan:

“Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap posisi keuangan maupun perkembangan perusahaan dibagi dua, yaitu pihak *internal* dan *eksternal*”.

Menurut Hans Kartikahadi dkk (2016:12), sebagai berikut: “Laporan keuangan adalah media utama bagi suatu entitas untuk mengkomunikasikan informasi keuangan oleh manajemen kepada para pemangku kepentingan”.

Sedangkan menurut Kasmir (2018:7), Laporan keuangan adalah:

“... laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Kondisi keuangan perusahaan saat ini adalah keuangan perusahaan pada tanggal tertentu (untuk neraca) dan periode tertentu (untuk laporan laba rugi)”.

Berdasarkan dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang menghasilkan laporan penting untuk memperoleh suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan/ entitas saat ini atau pada saat periode tertentu untuk

pihak-pihak yang berkepentingan dan menjadikan informasi tersebut sebagai gambaran tentang hasil kinerja yang telah dicapai oleh perusahaan.

Sedangkan Pengertian laporan keuangan fiskal menurut Siti Resmi (2019:391), merupakan laporan yang disusun sesuai peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan perhitungan pajak.

Menurut Siti Resmi (2019:392-394), penyebab perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal yang menyebabkan koreksi fiskal yaitu:

1. “Perbedaan Prinsip Akuntansi
Beberapa prinsip akuntansi yang berlaku secara umum (Standar Akuntansi Keuangan disingkat SAK) yang telah diakui secara umum dalam dunia bisnis dan profesi, tetapi tidak diakui dalam fiskal, meliputi:
 - a. Prinsip konservatisme
 - b. Prinsip harga perolehan
 - c. Prinsip pemadanan biaya-manfaat
2. Perbedaan metode dan prosedur akuntansi
 - a. Metode penilaian persediaan.
 - b. Metode penyusutan dan amortisasi.
 - c. Metode penghapusan piutang.
3. Perbedaan perlakuan dari pengakuan penghasilan dan biaya
 - a. Penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial, tetapi bukan merupakan objek pajak penghasilan.
 - b. Penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial tetapi pengenaan pajaknya bersifat final.
 - c. Penyebab perbedaan lain berasal dari penghasilan adalah:
 - Kerugian suatu usaha di luar negeri
 - Kerugian usaha dalam negeri tahun-tahun sebelumnya
 - Imbalan dengan jumlah yang melebihi kewajiban.
 - d. Pengeluaran tertentu diakui dalam akuntansi komersial sebagai biaya atau pengurangan penghasilan bruto, tetapi dalam fiskal pengeluaran tersebut tidak boleh dikurangi dari penghasilan bruto.”

Ada pula perbedaan penghasilan dan biaya/ pengeluaran menurut akuntansi dan menurut fiskal dapat dikelompokkan (Siti Resmi, 2019:395), menjadi:

1. “Perbedaan Tetap (*permanent differences*) terjadi karena transaksi-transaksi pendapatan dan biaya diakui menurut akuntansi komersial dan tidak diakui menurut fiskal atau sebaliknya.
2. Perbedaan Waktu/ Sementara/ Temporer (*time difference/temporary difference*), yakni perbedaan waktu pengakuan pendapatan atau biaya untuk penghitungan laba. Adanya suatu transaksi pendapatan atau biaya yang sudah diakui akuntansi tetapi menurut pajak belum dan sebaliknya. Contoh: pengakuan piutang, penyusutan harta berwujud, penilaian persediaan, dll”.

2.1.2.2 Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 (2015:3) adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomik.

Menurut (Hery, 2013:19), tujuan khusus laporan keuangan adalah: “... menyajikan secara wajar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum mengenai posisi keuangan, hasil usaha dan perubahan lain dalam posisi keuangan”.

Sedangkan Winwin Y (2017:16), dijelaskan tentang tujuan laporan keuangan secara umum yang isinya:

1. “memberikan informasi yang dapat diandalkan mengenai kekayaan ekonomi dan liabilitas bisnis perusahaan guna:
 - a. Mengevaluasi kekuatan dan kelemahan;
 - b. Menunjukkan pembiayaan dan investasi;
 - c. Mengevaluasi kemampuannya untuk memenuhi komitmennya; dan
 - d. Menunjukkan kekayaan untuk pertumbuhan.

2. Untuk memberikan informasi yang dapat diandalkan mengenai perubahan kekayaan yang dihasilkan dari keuntungan bisnis dan diarahkan untuk:
 - a. Menggambarkan dividen yang diharapkan diterima investor (pemegang saham);
 - b. Menggambarkan kemampuan perusahaan untuk membayar kreditur dan pemasok, menyediakan lapangan kerja bagi karyawan, membayar pajak, dan menghasilkan dana guna ekspansi usaha.
 - c. Memberikan informasi kepada manajemen untuk perencanaan dan pengendalian;
 - d. Menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan jangka Panjang.
3. Untuk memberikan informasi keuangan yang berguna dalam memperkirakan potensi pendapatan perusahaan.
4. Untuk memberikan informasi yang diperlukan lainnya mengenai perubahan kekayaan dan liabilitas ekonomi perusahaan.
5. Untuk mengungkapkan informasi relevan lainnya sesuai kebutuhan para pengguna.”

2.1.2.3 Karakteristik Laporan Keuangan

Karakteristik laporan keuangan menurut PSAK Kerangka Dasar

Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

1. “Dapat Dipahami

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Untuk maksud ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pemakai tertentu (Paragraf 25).

2. Relevan

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau mengoreksi, hasil evaluasi mereka dimasa lalu (Paragraf 26). Dalam relevan ada materialitas yaitu:

“Relevansi informasi dipengaruhi oleh hakekat dan materialitasnya. Dalam beberapa kasus, hakekat informasi saja sudah cukup untuk menentukan relevansinya. Misalnya, pelaporan suatu segmen baru dapat mempengaruhi penilaian risiko dan peluang yang dihadapi perusahaan tanpa mempertimbangkan materialitas dari hasil yang dicapai segmen baru tersebut dalam periode pelaporan. Dalam kasus lain, baik hakekat maupun materialitas dipandang penting, misalnya jumlah serta kategori persediaan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. (Paragraf 29)”.

3. Keandalan

Agar bermanfaat, informasi juga harus andal (*reliable*). Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (*faithful representation*) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan (Paragraf 31). Dalam Laporan keuangan yang andal harus melingkupi beberapa yaitu:

A. Penyajian Jujur

Agar dapat diandalkan, informasi harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. Jadi, misalnya, neraca harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya dalam bentuk aktiva, kewajiban dan ekuitas perusahaan pada tanggal pelaporan yang memenuhi kriteria pengakuan (Paragraf 33).

B. Substansi Mengungguli Bentuk

Jika informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka peristiwa tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya. Substansi transaksi atau peristiwa lain tidak selalu konsisten dengan apa yang tampak dari bentuk hukum. Misalnya, suatu perusahaan mungkin menjual suatu aktiva kepada pihak lain dengan cara sedemikian rupa sehingga dokumentasi dimaksudkan untuk memindahkan kepemilikan menurut hukum ke pihak tersebut; namun demikian, mungkin terdapat persetujuan yang memastikan bahwa perusahaan dapat terus menikmati manfaat ekonomi masa depan yang diwujudkan dalam bentuk aktiva. Dalam keadaan seperti itu, pelaporan penjualan tidak menyajikan dengan jujur transaksi yang dicatat (jika sesungguhnya memang ada transaksi) (Paragraf 35).

C. Netralitas

Informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai, dan tidak bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu.

Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan beberapa pihak, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain yang mempunyai kepentingan yang berlawanan (Paragraf 36).

D. Pertimbangan Sehat

Penyusun laporan keuangan adakalanya menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu, seperti ketertagihan piutang yang diragukan, prakiraan masa manfaat pabrik serta peralatan, dan tuntutan atas jaminan garansi yang mungkin timbul. Ketidakpastian semacam itu diakui dengan mengungkapkan hakekat serta tingkatnya dan dengan menggunakan pertimbangan sehat (*prudence*) dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aktiva atau penghasilan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban atau beban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi atau penyisihan (*provision*) berlebihan, dan sengaja menetapkan aktiva atau penghasilan yang lebih rendah atau pencatatan kewajiban atau beban yang lebih tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tak netral, dan karena itu, tidak memiliki kualitas andal (Paragraf 37).

E. Kelengkapan

Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan (*omission*) mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan dan karena itu tidak dapat diandalkan dan tidak sempurna ditinjau dari segi relevansi (Paragraf 38).

4. Dapat Dibandingkan

Pemakai harus dapat memperbandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (*trend*) posisi dan kinerja keuangan. Pemakai juga harus dapat memperbandingkan laporan keuangan antar perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk perusahaan tersebut, antar periode perusahaan yang sama dan untuk perusahaan yang berbeda (Paragraf 39)".

2.1.2.4 Jenis-jenis laporan Keuangan

Seperti yang diungkapkan PSAK 1 (2015:1.3), laporan keuangan yang lengkap terdiri atas komponen sebagai berikut:

1. Laporan posisi keuangan (Neraca) pada akhir periode.
2. Laporan laba rugi komprehensif selama periode
3. Laporan perubahan ekuitas selama periode.
4. Laporan arus kas selama periode.
5. Catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lain, dan informasi komparatif mengenai periode terdekat sebelumnya, serta 38-38A
6. Laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif, yang disajikan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya. 40-40d

Sedangkan menurut Hery (2013:19), laporan keuangan berdasarkan penyajiannya adalah:

1. Laporan laba rugi (*Income Statement*) merupakan laporan yang sistematis tentang pendapatan dan beban perusahaan untuk satu periode waktu tertentu. Laporan laba rugi ini akhirnya memuat informasi mengenai hasil usaha perusahaan, yaitu laba/ rugi bersih, yang merupakan hasil dari pendapatan dikurangi beban.
2. Laporan modal pemilik (*Statement of owner's equity*) adalah sebuah laporan yang menyajikan ikhtisari perubahan dalam modal pemilik suatu perusahaan untuk satu periode waktu tertentu (laporan perubahan modal).
3. Neraca (laporan posisi keuangan) adalah sebuah laporan yang sistematis tentang posisi aset, kewajiban dan modal perusahaan per tanggal tertentu. Tujuan neraca adalah untuk menggambarkan posisi keuangan perusahaan.
4. Laporan arus kas (*Statement of cash flows*) adalah sebuah laporan yang menggambarkan arus kas masuk dan arus kas keluar secara terperinci dari masing-masing aktivitas, mulai dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, sampai pada aktivitas pendanaan (pembiayaan) untuk satu periode waktu tertentu. Laporan arus kas menunjukkan besarnya kenaikan dan penurunan bersih kas dari seluruh aktivitas selama periode berjalan serta saldo kas yang dimiliki perusahaan sampai dengan akhir periode.

Catatan atas laporan keuangan (*notes to the financial statements*) tujuan catatan ini adalah untuk memberikan penjelasan yang lebih lengkap mengenai informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

2.1.2.5 Unsur-Unsur laporan Keuangan

Berdasarkan beberapa jenis laporan keuangan yang telah disebutkan di atas, penulis hanya menggunakan laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, dan laporan arus kas. Menurut PSAK Kerangka Dasar Penyusunan Penyajian Laporan Keuangan paragraf 47-81 Unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Sedangkan unsur yang berkaitan dengan pengukuran kinerja dalam laporan laba rugi adalah penghasilan dan beban.

1. Laporan Posisi Keuangan

A. Aktiva

Aktiva adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dimasa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan (PSAK, Paragraf 49).

Menurut Kasmir (2018:39), Aktiva adalah sebagai berikut: "... merupakan harta atau kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan, baik pada saat tertentu maupun periode tertentu."

Sedangkan menurut Mamduh M Hanafi (2016:29), aktiva adalah:

"... Sumber ekonomi organisasi yang dipakai untuk menjalankan kegiatannya. Atau bisa juga didefinisikan sebagai

manfaat ekonomis yang akan diterima di masa yang akan datang, atau akan dikuasai oleh perusahaan sebagai hasil dari transaksi atau kejadian tertentu”.

Berdasarkan dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa aset adalah harta, kekayaan dan sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk menjalankan kegiatan usahanya yang digunakan untuk kepentingan perusahaan di masa yang akan datang.

Jenis-jenis aktiva menurut Kasmir (2018:39) terdiri atas:

- **Aktiva Lancar**, merupakan harta atau kekayaan yang segera dapat diuangkan (ditunaikan) pada saat dibutuhkan dan paling lama satu tahun. Komponen yang ada di aktiva lancar terdiri dari antara lain:
 - a. Kas merupakan uang tunai yang dimiliki perusahaan dan dapat segera digunakan setiap saat. Kas merupakan komponen aktiva lancar paling dibutuhkan guna membayar berbagai kebutuhan yang diperlukan.
 - b. Bank merupakan tempat perusahaan menyimpan uang atau menitipkan uangnya dalam bentuk simpanan. Contoh jenis simpanan yang ada di bank rekening giro dan rekening tabungan.
 - c. Surat-surat berharga merupakan harta perusahaan yang ditanamkan dalam bentuk kertas berharga dan memiliki jangka waktu tidak lebih dari satu tahun. Keuntungan memiliki surat berharga antara lain bunga atau jasa atas surat-surat berharga tersebut.
 - d. Piutang merupakan tagihan perusahaan kepada pihak lainnya yang memiliki jangka waktu tidak lebih dari satu tahun. Piutang ini terjadi akibat dari penjualan barang atau jasa kepada konsumennya secara angsuran (kredit). Jenis piutang dibagi 2 yaitu: piutang dagang dan piutang wesel tagih.
 - e. Sediaan merupakan sejumlah barang yang disimpan oleh perusahaan dalam suatu tempat (gudang). Jenis sediaan dibagi dua yaitu: untuk perusahaan dagang adalah semua barang yang diperdagangkan, sedangkan untuk perusahaan manufakturing adalah barang mentah, barang dalam proses, dan barang jadi.
 - f. Sewa dibayar dimuka
 - g. aktiva lancar lainnya.

- **Aktiva tetap**, merupakan harta atau kekayaan perusahaan yang digunakan dalam jangka panjang lebih dari satu tahun.
Secara garis besar, aktiva tetap dibagi dua macam yaitu:
 - a. Aktiva tetap yang berwujud (tampak fisik) seperti: tanah, bangunan, mesin, kendaraan, dan lainnya.
 - b. Aktiva tetap yang tidak berwujud seperti: hak paten, merek dagang, *goodwill*, lisensi dan lainnya.
- **Aktiva lainnya**, merupakan harta atau kekayaan yang tidak dapat digolongkan ke dalam aktiva lancar maupun aktiva tetap. Komponen yang ada dalam di aktiva lainnya adalah seperti: bangunan dalam proses, piutang jangka panjang, tanah dalam penyelesaian dan lainnya.

B. Kewajiban

Merupakan utang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu (PSAK, Paragraf 49).

Menurut Hans Kartikahadi dkk (2016:162), sebagai berikut:

“Merupakan utang entitas masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi”.

Sedangkan menurut Mamduh M Hanafi (2016:29), yang dimaksud dengan utang adalah:

“... pengorbanan ekonomis yang mungkin timbul di masa mendatang dari kewajiban organisasi sekarang untuk mentransfer aset atau memberikan jasa ke pihak lain di masa mendatang, sebagai akibat transaksi atau kejadian di masa lalu. Utang muncul terutama karena penundaan pembayaran untuk barang atau jasa yang telah diterima oleh organisasi dan dari dana yang dipinjam”.

Berdasarkan dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa utang adalah kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu karena menunda pembayaran, yang menjadi tanggung jawab perusahaan untuk dilunasi/ dibayarkan dimasa mendatang.

Jenis-jenis utang menurut Kasmir (2018:42), terdiri dari:

- **Utang lancar (Utang jangka pendek)**

Merupakan kewajiban atau utang perusahaan kepada pihak lain yang harus segera dibayar. Jangka waktu utang lancar adalah maksimal dari satu tahun.

Komponen utang lancar terdiri dari:

- a. Utang Dagang
Merupakan kewajiban perusahaan karena adanya pembelian barang yang pembayarannya secara kredit (angsuran). Artinya perusahaan membeli barang dagang yang pembayarannya dilakukan dimasa yang akan datang.
- b. Utang Bank Maksimal Satu Tahun
Merupakan sejumlah uang yang diperoleh perusahaan dari lembaga keuangan Bank dan pembayarannya secara angsuran sesuai perjanjian kedua belah pihak.
- c. Utang Wesel
Merupakan kewajiban perusahaan kepada pihak lain akibat adanya perjanjian tertulis yang dilakukan oleh perusahaan untuk membayar sejumlah uang tertentu, dalam waktu tertentu pula (diatur dengan Undang-Undang).
- d. Utang Gaji
- e. Utang Jangka Pendek Lainnya.

- **Utang Tidak Lancar (Utang jangka panjang)**

Merupakan kewajiban perusahaan kepada pihak lain yang memiliki jangka waktu lebih dari satu tahun. Artinya jatuh tempo utang tersebut relatif lebih panjang dari utang lancar.

Komponen yang ada dalam utang jangka panjang adalah seperti:

- a. Obligasi
Merupakan utang perusahaan kepada pihak lain yang dimiliki jangka waktu lebih dari satu tahun. Utang ini timbul karena perusahaan menerbitkan obligasi tertentu kemudian dijual kepada pihak lain.
- b. Hipotek
Merupakan utang perusahaan yang dijamin dengan aktiva tetap tertentu. Hipotek biasanya diterbitkan dalam jangka waktu relatif panjang di atas satu tahun.
- c. Utang Bank Yang Lebih Dari Satu Tahun
- d. Utang Jangka Panjang Lainnya.

C. Ekuitas

Ekuitas adalah hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban (PSAK, Paragraf 49).

Komponen Ekuitas menurut Kasmir (2018:44), yaitu:

- **Modal setor**
Merupakan setoran modal dari pemilik perusahaan dalam bentuk saham dalam jumlah tertentu. Artinya keseluruhan saham yang dimiliki oleh perusahaan yang sudah dijual dan uangnya harus disetor sesuai dengan aturan yang berlaku.
- **Agio saham**
- **Laba yang ditahan**
Merupakan laba atau keuntungan perusahaan yang belum dibagi untuk periode tertentu. Artinya ada keuntungan perusahaan yang belum dibagikan dividennya dan masih disimpan sampai waktu tertentu karena suatu alasan tertentu pula.
- **Cadangan laba**
Merupakan bagian dari laba perusahaan yang tidak dibagi ke pemegang saham pada periode ini, akan tetapi sengaja dicadangkan perusahaan untuk laba periode berikutnya.

2. Laporan Laba Rugi Komprehensif

Menurut Kieso (2007:142) laporan laba rugi merupakan keuangan yang memberikan penilaian tentang keberhasilan dalam operasi perusahaan selama periode tertentu dan sebagai media informasi yang dapat digunakan investor maupun kreditor dalam menentukan atau memperkirakan jumlah penetapan waktu dan ketidakpastian dari arus kas dimasa akan datang.

A. Penghasilan

Definisi penghasilan (*income*) meliputi baik pendapatan (*revenues*) maupun keuntungan (*gains*). Pendapatan timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda dengan pendapatan. Oleh karena itu, pos tersebut tidak dipandang sebagai unsur terpisah dalam kerangka dasar ini (PSAK, Paragraf 74).

B. Beban

Definisi beban mencakupi baik kerugian maupun beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa. Beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa meliputi, misalnya beban pokok penjualan, gaji dan penyusutan (PSAK, Paragraf 78).

3. Laporan Arus Kas

Menurut PSAK No.1, Informasi arus kas menyediakan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas dan kebutuhan entitas dalam menggunakan arus kas tersebut (PSAK, paragraf 111).

2.1.3 Asimetri Informasi

2.1.3.1 Pengertian Asimetri Informasi

Pengertian Asimetri Informasi menurut Scott (2009:105) sebagai berikut:

“Frequently, one type of participant in the market (sellers, for example) will know something about the assets being traded the other type of participant (buyers) does not know. When this situation exists, the market is said to be characterized by information asymmetry”

Pernyataan kutipan di atas menjelaskan bahwa, Asimetri Informasi merupakan salah satu pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut memiliki keunggulan dan kelebihan informasi mengenai aset yang diperdagangkan dibandingkan dengan pihak lain.

Menurut Mamduh M. Hanafi (2014:217) yaitu:

“Konsep signaling dan asimetri informasi berkaitan erat, teori asimetri mengatakan bahwa pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan tidak mempunyai informasi yang sama mengenai prospek dan risiko perusahaan, pihak tertentu mempunyai informasi lebih baik dibandingkan dengan pihak luar.”

Sedangkan menurut Jogiyanto (2010:387), pengertian asimetri informasi, yaitu: “... kondisi yang menunjukkan sebagian investor mempunyai informasi dan yang lainnya tidak memiliki”.

Berdasarkan dari beberapa uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa asimetri informasi adalah adanya ketimpangan informasi antara dua pihak-pihak yaitu pihak yang berada di dalam lingkup *internal* dan pihak berada di luar (*eksternal*) perusahaan seperti pemegang saham. Sedangkan dalam lingkup perpajakan, asimetri informasi terjadi diantara wajib pajak dan fiskus, sehingga memicu adanya tindakan-tindakan agresivitas pajak yang terjadi.

2.1.3.2 Jenis – Jenis Asimetri Informasi

Dalam Scott asimetris informasi menjadi dua jenis berdasarkan bagaimana suatu pihak memiliki informasi diantara pemilik perusahaan dan manajer. Menurut Scott (2009:13-15), dua jenis asimetri informasi sebagai berikut:

1. *Adverse selection*
“*Adverse selection is a type of information asymmetry whereby one or more parties to a business transaction, or potential transaction, have an information advantage over other parties*”.
2. *Moral hazard*
“*Moral hazard is a type of information asymmetry whereby one or more parties to a business transaction, or potential transaction, can observe their actions in fulfillment of the transaction but other parties cannot*”

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa *adverse selection* adalah jenis informasi yang diperoleh dimana satu atau lebih pihak dalam suatu transaksi bisnis, atau transaksi potensial yang memiliki keunggulan informasi melalui pihak lain. *Adverse selection* terjadi karena beberapa orang seperti manajer perusahaan dan para pihak dalam (*insiders*) lainnya mengetahui kondisi terkini dan prospek ke depan suatu perusahaan daripada para investor luar.

Sedangkan *moral hazard* adalah jenis informasi dimana satu atau lebih pihak dalam suatu transaksi bisnis, atau transaksi potensial, dapat mengamati tindakan mereka dalam pemenuhan transaksi tetapi pihak lain tidak bisa. *Moral hazard* dapat terjadi karena adanya pemisahan kepemilikan dan pengendalian yang merupakan karakteristik kebanyakan perusahaan besar.

2.1.4 Manajemen Laba

2.1.4.1 Pengertian Laba

Menurut Samryn (2012:429), menyatakan bahwa pengertian laba adalah sebagai berikut:

“Laba merupakan sumber dana *internal* yang dapat diperoleh dari aktivitas normal perusahaan yang tidak membutuhkan biaya ekstra untuk penyimpanan dan penguanannya”.

Menurut Kasmir (2018:45), Laba adalah sebagai berikut: “... selisih dari jumlah pendapatan dan biaya, dengan hasil jumlah pendapatan perusahaan lebih besar dari jumlah biaya”.

Sedangkan menurut Greuning et. al., (2013:39) menyatakan laba adalah: “... jumlah yang dapat diberikan kepada semua pemegang saham biasa dari induk (yang memiliki kendali maupun tidak)”.

Berdasarkan dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Laba adalah suatu penerimaan pendapatan yang diperoleh dari aktiva perusahaan sebagai suatu imbalan.

2.1.4.2 Pengertian Manajemen

Manajemen Laba menurut Sudarwan dan Yunan Danim (2010:18), mengemukakan bahwa:

“Manajemen sebagai sebuah proses yang khas, yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, dan pengawasan, yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-sumber lain untuk mencapai tujuan tertentu.”

Menurut George R. Terry dalam Sukarna (2011:3), menyatakan bahwa: *“management is the accomplishing of a predeternined objectives through the efforts of other people.”* Jika diartikan, Manajemen adalah pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkan melalui atau bersama-sama usaha orang lain.

Sedangkan menurut Handoko (1997:8), manajemen adalah:

“... proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.”

Berdasarkan dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Manajemen merupakan tindakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan serta pengawasan yang dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan melalui atau bersama-sama usaha orang lain.

2.1.4.3 Pengertian Manajemen Laba

Menurut Sri Sulistyanto (2008:6) menyatakan sebagai berikut:

“Manajemen laba adalah upaya manajer perusahaan untuk mengintervensi atau mempengaruhi informasi-informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui stakeholder yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan.”

Pengertian manajemen laba menurut Davidson, Stickney, dan Weil (1987) dalam Sri Sulistyanto (2008:42) sebagai berikut:

“Earnings management is the process of taking deliberate steps within the constraints of generally accepted accounting principles to bring about desired level of reported earnings.”

Jika diartikan adalah “Manajemen laba merupakan proses untuk mengambil langkah tertentu yang disengaja dalam batas-batas prinsip akuntansi

berterima umum untuk menghasilkan tingkat yang diinginkan dari laba yang dilaporkan.”

Pengertian Manajemen laba menurut Schipper (1989) dalam K.R Subramanyam dan John J.Wild (2012:131), yaitu: “... intervensi manajemen dengan sengaja dalam proses penentuan laba, biasanya untuk memenuhi tujuan pribadi”.

Menurut Feryansyah et al (2020) dalam Ikhwan (2021:8305) sebagai berikut:

“Manajemen laba merupakan intervensi informasi laba yang sengaja dilakukan oleh manajemen dalam proses pelaporan keuangan dengan maksud untuk menaikkan ataupun menurunkan laba perusahaan”

Berdasarkan dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen laba merupakan tindakan upaya manajer tertentu yang disengaja untuk mempengaruhi informasi-informasi dalam laporan keuangan untuk memenuhi tujuan pribadi. Hal tersebut dapat merugikan bagi pihak-pihak *stakholder* karena informasi laba yang dihasilkan tidak menyatakan kondisi yang sebenarnya.

2.1.4.4 Bentuk-Bentuk Manajemen Laba

Bentuk-bentuk Manajemen laba yang dikemukakan oleh Sri Sulistiyanto (2018:155) meliputi:

1. Peningkatkan Laba (*Income Increasing*)

Upaya perusahaan mengatur agar laba periode berjalan menjadi lebih tinggi daripada laba sesungguhnya. Upaya ini dilakukan dengan mempermainkan pendapatan periode berjalan menjadi lebih tinggi daripada pendapatan sesungguhnya dan atau biaya periode berjalan menjadi lebih rendah dari biaya sesungguhnya.

2. Penurunan Laba (*Income Decreasing*)

Upaya perusahaan mengatur agar laba periode berjalan menjadi lebih rendah daripada laba sesungguhnya. Upaya ini dilakukan dengan memperlakukan pendapatan periode berjalan menjadi lebih rendah daripada pendapatan sesungguhnya dan atau biaya periode berjalan menjadi lebih tinggi dari biaya sesungguhnya

3. Perataan Laba (*Income Smoothing*)

Upaya perusahaan mengatur agar labanya relatif sama selama beberapa periode. Upaya ini dilakukan dengan memperlakukan pendapatan dan biaya periode berjalan menjadi lebih tinggi atau lebih rendah daripada pendapatan atau biaya sesungguhnya.

Adapun terdapat tiga jenis strategi manajemen laba menurut K.R

Subramanyam dan John J. Wild (2012:131-132), yaitu:

1. Meningkatkan Laba (*Increasing Income*)

Salah satu strategi manajemen laba adalah meningkatkan laba yang dilaporkan pada periode kini untuk membuat perusahaan dipandang lebih baik. Cara ini juga memungkinkan peningkatan laba selama beberapa periode.

2. *Big Bath*.

Strategi *Big Bath* dilakukan melalui penghapusan (*write-off*) sebanyak mungkin pada satu periode. Periode yang dipilih biasanya periode dengan kinerja yang buruk atau peristiwa saat terjadi satu kejadian yang tidak biasa seperti perubahan manajemen, merger, atau restrukturisasi. Strategi *big bath* juga sering kali digunakan setelah strategi peningkatan laba pada periode sebelumnya.

3. Perataan Laba (*Income Smoothing*)

Perataan laba merupakan bentuk umum manajemen laba. Pada strategi ini, manajer meningkatkan atau menurunkan laba yang dilaporkan untuk mengurangi fluktuasinya. Perataan laba juga mencakup tidak melaporkan bagian laba pada periode baik dengan menciptakan cadangan atau "Bank" dan kemudian melaporkan laba ini saat periode buruk.

2.1.4.5 Teknik Manajemen Laba

Menurut Sri Sulistyanto (2008:30-32), ada beberapa cara yang dipakai

perusahaan untuk memperlakukan besar kecilnya laba, yaitu:

1. Mengakui dan mencatat pendapatan lebih cepat satu periode atau lebih, upaya ini dilakukan manajer dengan mengakui dan mencatat pendapatan

periode-periode yang akan datang atau pendapatan yang secara pasti belum dapat ditentukan kapan dapat terealisasi sebagai pendapat periode berjalan (*current revenue*). Hal ini mengakibatkan pendapatan periode berjalan menjadi lebih besar dari pada pendapatan sesungguhnya.

2. Mengakui pendapatan lebih cepat satu periode atau lebih, upaya ini dilakukan mengakui pendapatan periode berjalan menjadi pendapatan periode sebelumnya. Hingga pendapatan periode berjalan menjadi lebih kecil dari pada pendapatan sesungguhnya. Semakin kecil pendapatan akan membuat laba periode berjalan juga akan menjadi semakin kecil dari pada laba sesungguhnya. Akibatnya, kinerja perusahaan untuk periode berjalan seolah-olah lebih buruk atau kecil bila dibandingkan dengan kinerja sesungguhnya.
3. Mencatat pendapatan palsu, upaya ini dilakukan manajer dengan mencatat pendapatan dari suatu transaksi yang sebenarnya tidak pernah terjadi, sehingga pendapatan ini juga tidak akan pernah terealisasi sampai kapanpun. Meningkatnya pendapatan ini membuat laba periode berjalan juga menjadi lebih besar daripada laba sesungguhnya. Upaya ini dilakukan perusahaan untuk mempengaruhi investor akan mau membeli sahamnya, menaikkan posisi perusahaan ke level yang lebih baik, dan sebagainya.
4. Mengakui dan mencatat biaya lebih cepat atau lambat, upaya ini dapat dilakukan manajer mengakui dan mencatat biaya periode-periode yang akan datang sebagai biaya periode berjalan (*current cost*). Upaya semacam ini membuat biaya periode berjalan menjadi lebih besar dari pada biaya sesungguhnya. Upaya semacam ini dilakukan perusahaan untuk mempengaruhi keputusan investor agar menjual sahamnya (*management buyout*), mengecilkan pajak yang harus dibayar kepada pemerintah, dan menghindari kewajiban pembayaran hutang.
5. Mengakui dan mencatat biaya lebih lambat, upaya ini dapat dilakukan dengan mengakui biaya periode berjalan menjadi biaya periode sebelumnya. Hingga biaya periode berjalan menjadi lebih kecil dari pada biaya sesungguhnya. Semakin kecilnya biaya ini membuat laba periode berjalan juga akan menjadi lebih besar daripada laba sesungguhnya. Akibatnya membuat kinerja perusahaan untuk periode berjalan seolah-olah lebih baik atau besar bila dibandingkan dengan kinerja sesungguhnya. Upaya ini dilakukan perusahaan untuk mempengaruhi investor akan mau membeli sahamnya, menaikkan posisi perusahaan ke level yang lebih baik, dan sebagainya.
6. Tidak mengungkapkan semua kewajiban, upaya ini dapat dilakukan manajer menyembunyikan seluruh atau sebagian kewajibannya, sehingga kewajiban periode berjalan menjadi lebih kecil dari pada kewajiban sesungguhnya. Upaya semacam ini dilakukan perusahaan untuk mempengaruhi keputusan investor agar mau membeli saham yang ditawarkannya, menghindari kebijakan multi papan, dan sebagainya.

2.1.4.6 Pengukuran Manajemen Laba

Menurut Sri Sulistyanto (2008:189) ada beberapa model untuk pendeteksi manajemen laba yaitu dengan model:

1. Model Healy 1985

Secara umum model ini tidak berbeda dengan model-model lain yang dipergunakan untuk mendeteksi manajemen laba dalam menghitung nilai total akrual (TAC).

Langkah I: Menghitung nilai total akrual (TAC) yang merupakan selisih dari pendapatan bersih (*net income*) dengan arus kas operasi untuk setiap perusahaan dan setiap tahun pengamatan.

$$TAC = Net\ Income - Cash\ flows\ from\ operations$$

Langkah II: Menghitung nilai *nondiscretionary accruals* (NDA) model healy membagi rata-rata total akrual (TAC) dengan total aktiva periode sebelumnya.

$$NDA_t = \frac{\sum TA}{T}$$

Keterangan:

NDA_t = *Nondiscretionary accruals*.

TAC = Total akrual yang diskala dengan total aktiva periode $t-1$.

t = 1, 2,T merupakan tahun *subscript* untuk tahun yang dimasukkan dalam periode estimasi

T = Tahun *subscript* yang mengindikasikan tahun dalam periode estimasi.

Langkah III: Menghitung nilai *discretionary accruals* (DA), yaitu selisih antara total akrual (TAC) dengan *nondiscretionary accruals* (NDA). *Discretionary accruals* merupakan proksi manajemen laba.

$$DA = TAC - NDA$$

2. *De Angelo Model (1986)*

Model lain untuk mendeteksi manajemen laba dikembangkan oleh *De Angelo* pada tahun 1986.

Langkah I: Menghitung nilai total akrual (*TAC*) yang merupakan selisih dari pendapatan bersih (*net income*) dengan arus kas operasi untuk setiap perusahaan dan setiap tahun pengamatan.

$$TAC = Net\ Income - Cash\ flows\ from\ operations$$

Langkah II: Menghitung nilai *nondiscretionary accruals (NDA)* yang merupakan rata-rata total akrual (*TAC*) dibagi dengan total aktiva periode sebelumnya.

$$NDA_t = TAC_{t-1}$$

Keterangan:

NDA_t = *Non Discretionary accruals* yang diestimasi.

TAC_t = Total akrual periode t .

TA_{t-1} = Total aktiva periode $t-1$.

Langkah III: Menghitung nilai *discretionary accruals (DA)*, yaitu selisih antara total akrual (*TAC*) dengan *nondiscretionary accruals (NDA)*. *Discretionary accruals* merupakan proksi manajemen laba.

$$DA = TAC - NDA$$

3. *Model Jones (1991)*

Jones (1991) mengajukan model yang menolak asumsi bahwa *nondiscretionary accruals* adalah konstan.

Langkah I: Menghitung nilai total akrual (*TAC*) yang merupakan selisih dari pendapatan bersih (*net income*) dengan arus kas operasi untuk setiap perusahaan dan setiap tahun pengamatan.

$$TAC = Net\ Income - Cash\ flows\ from\ operations$$

Langkah II: menghitung nilai *nondiscretionary accruals* sesuai dengan rumus di atas dengan terlebih dahulu melakukan regresi linear sederhana terhadap TAC_{it}/TA_{it-1} sebagai variabel dependen serta, $1/TA_{it-1}$, $\Delta Sales_{it}/TA_{it-1}$, dan PPE_{it}/TA_{it-1} sebagai variabel independennya. Model ini mencoba mengontrol pengaruh perubahan keadaan ekonomi perusahaan pada non discretionary accruals sebagai berikut :

$$\frac{TAC_{it}}{TA_{it-1}} = b_1 \left(\frac{1}{TA_{it-1}} \right) + b_2 \left(\frac{\Delta Sales_{it}}{TA_{it-1}} \right) + b_3 \left(\frac{PPE_{it}}{TA_{it-1}} \right)$$

Dengan melakukan regresi terhadap ketiga variabel itu akan diperoleh koefisien dari variabel independen yaitu b_1 , b_2 , dan b_3 yang akan dimasukkan dalam persamaan di bawah ini untuk menghitung nilai non discretionary accruals.

$$NDA_t = b_1 \left(\frac{1}{TA_{it-1}} \right) + b_2 \left(\frac{\Delta Sales_{it} - \Delta Rev}{TA_{i,t-1}} \right) + b_3 \left(\frac{PPE_{it}}{TA_{it-1}} \right)$$

Keterangan:

- ΔREV_t = Revenue pada tahun t dikurangi revenue pada tahun t – 1 dibagi total aktiva tahun t – 1
- b_1 = Estimated intercept perusahaan i periode t
- b_2, b_3 = Slope untuk perusahaan i periode t
- PPE_{it} = Aktiva tetap (Gross property, plant, and equipment) perusahaan i periode t
- $TA_{i,-1}$ = Total aktiva perusahaan i periode t-1

Langkah III: menghitung nilai *discretionary accruals* (DTA), yaitu selisih antara total akrual (TAC) dengan *nondiscretionary accruals* (NDA).

$$DTA = TAC - NDA_{i,t}$$

4. *Modified Jones Model*

Model jones dimodifikasi (*modified jones model*) merupakan modifikasi dari *model jones* yang didesain untuk mengeliminasi kecenderungan untuk menggunakan perkiraan yang bisa salah dari model *Jones* untuk menentukan *discretionary accruals* ketika *discretion* melebihi pendapatan. Cara perhitungan *modified jones model* adalah sebagai berikut:

Langkah I: Menghitung Total *Accrual* (TAC) yaitu laba bersih tahun t dikurangi arus kas operasi tahun t.

$$TAC = NI_{i,t} - CFO_{i,t}$$

Selanjutnya total akrual diestimasi dengan *Ordinary Least Square* dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{TAC_{i,t}}{TA_{i,t-1}} = b_0 \left(\frac{1}{TA_{i,t-1}} \right) + b_1 \left(\frac{\Delta Sales_t}{TA_{i,t-1}} \right) + b_2 \left(\frac{PPE_{i,t}}{TA_{i,t-1}} \right) + \varepsilon$$

Langkah II: Dengan koefisien regresi sebagaimana di atas, maka *Non Discretionary Accrual* ditentukan sebagai berikut:

$$NDA_{i,t} = b_0 \left(\frac{1}{TA_{i,t-1}} \right) + b_2 \left(\frac{\Delta Sales_t - \Delta TR_{i,t}}{TA_{i,t-1}} \right) + b_3 \left(\frac{PPE_{i,t}}{TA_{i,t-1}} \right)$$

Langkah III: Terakhir untuk menentukan nilai *Discretionary Accrual* sebagai ukuran manajemen laba ditentukan sebagai berikut:

$$DTA_{i,t} = \frac{TAC_{i,t}}{TA_{i,t-1}} - NDA_{i,t}$$

Keterangan:

$DTA_{i,t}$	=	<i>Discretionary Accruals</i> perusahaan i dalam periode tahun t
$NDA_{i,t}$	=	<i>Nondiscretionary Accruals</i> perusahaan i dalam periode tahun t
$TAC_{i,t}$	=	Total Accrual perusahaan i dalam periode tahun t
$NI_{i,t}$	=	Laba bersih perusahaan i dalam periode tahun t
$CFO_{i,t}$	=	Arus kas dari aktivitas operasi perusahaan i dalam periode tahun t
TA_{it-1}	=	Perubahan total aset perusahaan i periode t-1
$\Delta Sales_{i,t}$	=	Penjualan perusahaan i pada tahun t dikurangi dengan penjualan perusahaan i pada tahun t-1
$\Delta TR_{i,t}$	=	Piutang usaha perusahaan i pada tahun t dikurangi dengan piutang usaha perusahaan i pada tahun t-1
PPE_{it}	=	Total aset tetap berwujud (<i>Gross property, plant and equipment</i>) perusahaan i dalam periode tahun t
E	=	Error

Dari beberapa pengukuran di atas, metode pengukuran manajemen laba yang akan penulis gunakan yaitu menggunakan *modified jones model* karena *modified jones model* ini merupakan metode pendeteksian manajemen laba yang secara statistik paling baik dan lebih kuat dibandingkan dengan metode pendeteksi lainnya (Sri Sulistyanti 2008:226).

Nilai *discretionary accruals* ($DTA_{i,t}$) mengindikasikan tingkat akrual hasil praktik manajemen laba, jika nilai $DTA_{i,t} > 0$ maka perusahaan melakukan manajemen laba sedangkan jika $DTA_{i,t} \leq 0$ maka tidak melakukan manajemen laba, (Ramawati, 2020).

2.1.5 Likuiditas

2.1.5.1 Pengertian Likuiditas

Menurut Kasmir (2018:129) menyebutkan bahwa rasio likuiditas (*liquidity ratio*) merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban (utang) jangka pendek.

Adapun pengertian menurut Hans Kartikahadi dkk (2016:160), yaitu:

“Likuiditas adalah tersedianya dana kas dan saldo yang ada direkening Bank yang tidak terikat dengan suatu pembatasan penggunaan baik peraturan ataupun suatu perjanjian, dan aset setara kas yang diperlukan untuk membayar liabilitas secara tepat waktu. Suatu entitas dikatakan likuid bila memiliki cukup dana tunai atau aset yang setiap saat dapat dikonversikan menjadi dana tunai untuk memenuhi liabilitasnya ketika jatuh tempo”.

Sedangkan James O.Gill dalam Kasmir (2018:130) menyebutkan rasio likuiditas adalah:

“... Mengukur jumlah kas atau jumlah investasi yang dapat dikonversikan atau diubah menjadi kas untuk membayar pengeluaran, tagihan, dan seluruh kewajiban lainnya yang sudah jatuh tempo”

Berdasarkan dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa likuiditas adalah mengukur jumlah kemampuan tersediaan aset suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban membayar liabilitas (utang) jangka pendek ketika jatuh tempo.

2.1.5.2 Tujuan dan Manfaat Likuiditas

Likuiditas memiliki banyak manfaat untuk pihak-pihak berkepentingan terhadap perusahaan. Pihak yang paling berkepentingan dalam hal ini adalah

pemilik perusahaan dan manajeen perusahaan guna menilai kemampuan perusahaan itu sendiri. Selain itu pihak berkepentingan lainnya kreditor dan investor untuk mengetahui seberapa likuid perusahaannya.

Menurut Kasmir (2018:132), berikut ini adalah tujuan dan manfaat yang dapat dipetik dari hasil rasio likuiditas:

1. "Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih. Artinya, kemampuan untuk membayar kewajiban yang sudah waktunya dibayar sesuai jadwal batas waktu yang telah ditetapkan (tanggal dan bulan tertentu).
2. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar secara keseluruhan. Artinya, jumlah kewajiban yang berumur di bawah satu tahun atau sama dengan satu tahun, dibandingkan dengan total aktiva lancar.
3. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan sediaan atau piutang. Dalam hal ini aktiva lancar dikurangi sediaan dan utang yang dianggap likuiditasnya lebih rendah.
4. Untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah sediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan.
5. Untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang.
6. Sebagai alat perencanaan ke depan, terutama yang berkaitan dengan perencanaan kas dan utang.
7. Untuk melihat kondisi dan posisi likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu dengan membandingkannya untuk beberapa periode.
8. Untuk melihat kelemahan yang dimiliki perusahaan, dari masing-masing komponen yang ada diaktiva lancar dan utang lancar.
9. Menjadi alat pemicu bagi pihak manajemen untuk memperbaiki kinerja, dengan melihat rasio likuiditas yang ada pada saat ini."

2.1.5.3 Pengukuran Likuiditas

Menurut Kasmir (2018:133-142), dalam praktiknya, untuk mengukur rasio keuangan secara lengkap, dapat menggunakan jenis-jenis rasio likuiditas yang ada. Jenis-jenis rasio likuiditas yang dapat digunakan perusahaan untuk mengukur kemampuan, yaitu:

1. Rasio Lancar (*Current Ratio*)

Rasio Lancar (*Current Ratio*) merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Dengan kata lain, seberapa banyak aktiva lancar yang tersedia untuk menutupi kewajiban jangka pendek yang segera jatuh tempo. Rumus untuk mencari rasio lancar atau current ratio dapat yang digunakan sebagai berikut:

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Aktiva lancar (Current Asset)}}{\text{Utang Lancar (Current Liabilities)}}$$

2. Rasio Cepat (*Quick Ratio*)

Rasio Cepat (*Quick Ratio*) atau rasio sangat lancar atau *acid test ratio* merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi atau membayar kewajiban atau utang lancar (utang jangka pendek) dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai sediaan (*inventory*). Artinya nilai sediaan kita abaikan, dengan cara dikurangi dari nilai total aktiva lancar. Rumus untuk mencari rasio cepat (*quick ratio*) dapat digunakan sebagai berikut:

$$\text{Quick Ratio (Acid Tes Ratio)} = \frac{\text{Current Asset} - \text{Inventory}}{\text{Current Liabilities}}$$

Atau

$$\text{Quick Ratio (Acid Tes Ratio)} = \frac{\text{Kas} + \text{Bank} + \text{Efek} + \text{Piutang}}{\text{Current Liabilities}}$$

3. Rasio Kas (*Cash Ratio*)

Rasio kas atau *cash ratio* merupakan alat yang digunakan untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang. Rumus untuk mencari rasio kas atau *cash ratio* dapat digunakan sebagai berikut:

$$\text{Cash Ratio} = \frac{\text{Cash or Cash Equivalent}}{\text{Current Liabilities}}$$

Atau

$$\text{Cash Ratio} = \frac{\text{Kas + Bank}}{\text{Current Liabilities}}$$

4. Rasio perputaran kas (*Cash Turn Over*)

Rasio perputaran kas (*Cash Turn Over*) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat kecukupan modal kerja perusahaan yang dibutuhkan untuk membayar tagihan dan membiayai penjualan. Artinya rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat ketersediaan kas untuk membayar tagihan (utang) dan biaya-biaya yang berkaitan dengan penjualan. Rumus yang digunakan untuk mencari rasio perputaran kas adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Perputaran Kas} = \frac{\text{Penjualan Bersih}}{\text{Modal Kerja Bersih}}$$

5. *Inventory to net working capital*

Inventory to net working capital merupakan rasio yang mengukur atau membandingkan antara jumlah sediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan. Rumusan untuk mencari *Inventory to net working capital* dapat digunakan sebagai berikut:

$$\text{Inventory To NWC} = \frac{\text{Inventory}}{\text{Current Asset} - \text{Current Liabilities}}$$

Dari beberapa pengukuran diatas, metode pengukuran likuiditas yang akan penulis gunakan yaitu menggunakan rasio lancar (*current ratio*) karena rasio lancar digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar

kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Hal ini sejalan dengan pengertian likuiditas menurut Kasmir (2018:134) yaitu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek.

Sedangkan untuk ketentuan tingkat likuiditas yang baik menurut Kasmir (2018:135) adalah: “Ukuran kesehatan rasio lancar (*Current Ratio*) memiliki standar 200% (2:1) atau 2 kali sudah dianggap baik perusahaan melunasi kewajiban jangka pendek”.

2.1.6 Leverage

2.1.6.1 Pengertian Leverage

Menurut Kasmir (2018:151), *leverage ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang. Artinya seberapa besar beban hutang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivasnya.

Menurut Hans Kartikahadi dkk (2016:161) pengertian rasio *leverage*, yaitu:

“... untuk mengukur jumlah relatif liabilitasnya, yang digunakan suatu entitas untuk membiayai kegiatan usahanya, terutama untuk mengukur kemampuan melunasi liabilitasnya”.

Sedangkan pengertian menurut Murhadi, (2015:61) sebagai berikut: “Rasio utang (*Leverage ratio*) yang menggambarkan proporsi utang terhadap aset ataupun ekuitas”

Berdasarkan dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa leverage adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang.

2.1.6.2 Tujuan dan Manfaat *Leverage*

Menurut Kasmir (2018:153), Berikut adalah beberapa tujuan perusahaan dengan menggunakan rasio *leverage* yakni:

1. “Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya (kreditor);
2. Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga);
3. Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal;
4. Untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang;
5. Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva;
6. Untuk menilai atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka Panjang;
7. Untuk menilai berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, terdapat sekian kalinya modal sendiri yang dimiliki dan tujuan lainnya.”

Menurut Kasmir (2018:154), Manfaat *Leverage* ratio adalah:

1. “Untuk menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya;
2. Untuk menganalisis kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga);
3. Untuk menganalisis keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal;
4. Untuk menganalisis seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang;
5. Untuk menganalisis seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva;
6. Untuk menganalisis atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka Panjang;
7. Untuk menganalisis berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih ada terdapat sekian kalinya modal sendiri dan manfaat lainnya.”

2.1.6.3 Pengukuran Rasio *Leverage*

Menurut Kasmir (2018;155-163), dalam praktiknya terdapat beberapa jenis rasio *leverage* yang sering digunakan perusahaan. Adapun jenis-jenis rasio yang ada dalam rasio *leverage* antara lain:

1. *Debt to asset ratio (det ratio)*

Debt to asset ratio (det ratio) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Dengan kata lain, seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Rumusan untuk mencari *debt ratio* dapat digunakan sebagai berikut:

$$\text{Debt to asset ratio} = \frac{\text{Total debt}}{\text{Total Asset}}$$

2. *Debt to equity ratio*

Debt to equity ratio merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh utang, termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam dengan pemilik perusahaan. Rumusan untuk mencari *Debt to equity ratio* dapat digunakan sebagai berikut:

$$\text{Debt to equity ratio} = \frac{\text{Total debt}}{\text{Ekuitas (Equity)}}$$

3. *Long term debt to equity ratio (LTDtER)*

LTDtER merupakan rasio antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. Tujuannya adalah untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka Panjang dengan cara membandingkan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri yang disediakan oleh perusahaan. Rumusan untuk mencari LTDtER dapat digunakan sebagai berikut:

$$LTDtER = \frac{\text{Long term debt}}{\text{Equity}}$$

4. *Tangible Assets Debt Coverage*
5. *Current Liabilities To Net Worth*
6. *Times Interest Earned*

Menurut J. Fred Weston dalam Kasmir (2018;160) Rasio untuk mencari jumlah kali perolehan bunga. Rasio ini diartikan juga kemampuan perusahaan untuk membayar biaya bunga, sama seperti *coverage ratio*. Rumus untuk mencari *Times Interest Earned* dapat digunakan dengan dua cara sebagai berikut:

$$\text{Times Interest Earned} = \frac{\text{EBIT}}{\text{Biaya bunga (interest)}}$$

Atau

$$\text{Times Interest Earned} = \frac{\text{EBIT} + \text{Biaya Bunga}}{\text{Biaya bunga (interest)}}$$

7. *Fixed charge coverage (FCC)*

Fixed charge coverage atau lingkup biaya tetap merupakan rasio yang digunakan menyerupai rasio *times interest earned*. Hanya saja dalam rasio ini dilakukan apabila perusahaan memperoleh utang jangka Panjang atau menyewa aktiva berdasarkan kontrak sewa (*lease contract*). Rumus untuk mencari *Fixed charge coverage (FCC)* adalah sebagai berikut:

$$\text{Fixed charge coverage} = \frac{\text{EBIT} + \text{Biaya Bunga} + \text{Kewajiban Sewa/lease}}{\text{Biaya bunga (interest) + Kewajiban Sewa/lease}}$$

Dari beberapa pengukuran di atas, metode pengukuran *leverage* yang akan digunakan penulis yaitu *Debt ratio/ Debt to asset ratio* karena *Debt ratio* digunakan untuk mengukur seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Hal ini sejalan dengan pengertian *leverage* menurut Kasmir (2018:151) yang menyatakan bahwa *leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai dengan utang. Menurut Kasmir *debt to asset ratio* juga bisa digunakan untuk mengukur seberapa besar aset perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan dapat mempengaruhi pengelolaan aset korporasi.

Sedangkan untuk ketentuan tingkat *leverage* yang baik menurut Kasmir (2018:156), perusahaan akan dikatakan baik jika perusahaan itu bisa mencapai rasio dibawah rata-rata industri. Standar rata-rata industri sebesar 35%.

2.1.7 Agresivitas Pajak

2.1.7.1 Pengertian Pajak

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H dalam Siti Resmi (2019:1), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pengertian Pajak Menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan:

“Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut S.I Djajadiningrat dalam Siti Resmi (2019:1), sebagai berikut:

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum”.

Sedangkan pengertian pajak menurut P. J. A Andriani Pajak dalam Sukrisno Agoes (2009:4) adalah:

“... iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, langsung dapat ditunjuk, dan berguna untuk membiayai berbagai pengeluaran umum terkait dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

Berdasarkan dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran rakyat atau wajib pajak (Orang Pribadi dan Badan) yang berkontribusi menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik yang imbalan secara langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.1.7.2 Fungsi Pajak

Menurut Siti Resmi (2019:3) terdapat dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)
Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, Artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara,

pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara.

2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat ukur mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

2.1.7.3 Jenis-Jenis Pajak

Menurut Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati (2012:5), Pajak dapat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan golongan, sifat, dan lembaga pemungutannya.

1. “Menurut golongannya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
 - a. Pajak langsung, adalah pajak yang harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak (WP) dan pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contohnya adalah PPh.
 - b. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai untuk Barang dan Jasa serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
2. Menurut sifatnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
 - a. Pajak Subjektif, adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi WP. Contohnya adalah PPh.
 - b. Pajak Objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi WP. Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai untuk Barang dan Jasa, Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Bumi dan Bangunan.
3. Menurut Lembaga pemungutannya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
 - a. Pajak Pusat, adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya adalah PPh, Pajak Pertambahan Nilai untuk Barang, Jasa serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.
 - b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contohnya adalah Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Tanah, Pajak Reklame, serta Pajak Hotel dan Restoran.”

2.1.7.4 Sistem Perpajakan

Menurut Siti Resmi (2019:10), Sistem perpajakan dapat dibagi menjadi beberapa yaitu :

1. *Official Assessment System.*

Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan (fiskus) untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku. Adapun ciri-cirinya adalah :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b. Wajib pajak bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self Assessment System.*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung pajak dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Adapun wajib pajak diberi kepercayaan untuk:

- a. menghitung sendiri pajak yang terutang;
- b. memperhitungkan sendiri pajak yang terhutang;
- c. membayar sendiri jumlah pajak yang terutang;
- d. melaporkan sendiri jumlah pajak yang terhutang; dan
- e. mempertanggungjawabkan pajak yang terhutang.

3. *With Holding System.*

Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undang perpajakan yang berlaku. Adapun ciri-cirinya adalah wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

2.1.7.5 Pengertian Agresivitas Pajak

Pengertian agresivitas pajak menurut Frank at el (2009:468) dalam Mar Atun K (2019:18), adalah:

“...suatu tindakan yang dilakukan perusahaan untuk menurunkan beban pajak melalui perencanaan pajak dengan menggunakan cara secara legal (*tax avoidance*) atau secara *illegal* (*tax evasion*). Perbedaan *tax avoidance* dan *tax evasion* terdapat pada sisi legalitasnya”.

Menurut Lanis & Richardson (2012:86), pengertian agresivitas pajak sebagai berikut:

“... we define tax aggressiveness as the downward management of taxable income through tax planning activities. It thus encompasses tax planning activities that are legal or that may fall into the gray area, as well as activities that are illegal. Thus, the term tax aggressiveness is broadly defined.”

Dari kutipan di atas bahwa Agresivitas Pajak menurut Lanis & Richardson (2012:86), adalah sebagai berikut:

“... pengelolaan penghasilan kena pajak melalui kegiatan perencanaan pajak, baik perencanaan pajak secara legal yang mendekati area yang abu-abu (*gray area*) maupun kegiatan yang *illegal*”.

Menurut Suyatno dan Supramono (2012:170), Agresivitas pajak adalah: “... suatu tindakan yang ditunjukkan untuk menurunkan laba kena pajak melalui perencanaan pajak, baik menggunakan cara yang tergolong atau tidak tergolong *tax evasion*”.

Sedangkan menurut Lietz (2013:9), mendefinisikan agresivitas pajak sebagai berikut:

“Agresivitas pajak adalah sebagai strategi pengolahan pajak yang agresif. Strategi pengolahan pajak termasuk agresif apabila tidak secara terang-

terangan melanggar peraturan perpajakan yang berlaku yang akan berdampak negatif pada perkembangan perusahaan”.

Berdasarkan dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Agresivitas pajak merupakan tindakan yang dilakukan wajib pajak untuk meminimalkan pembayaran pajak (beban pajak) melalui perencanaan pajak, yang dilakukan baik secara legal (*tax avoidance*), secara illegal (*tax evasion*) atau jatuh ke area abu-abu.

2.1.7.6 Keuntungan dan Kerugian Agresivitas Pajak

Menurut Chen et al dalam Lucy Putri (2014:30), Ada tiga keuntungan yang diperoleh dari tindakan pajak agresif yaitu:

1. “Terdapat penghematan pajak yang dibayarkan perusahaan kepada negara, sehingga porsi yang dinikmati pemilik atau pemegang saham menjadi besar.
2. Terdapat bonus atau kompensasi yang mungkin diberikan pemilik atau pemegang saham kepada manajer atas tindakan pajak agresif yang telah dilakukannya dan menjadi keuntungan tersendiri bagi pemilik atau pemegang saham.
3. Terdapat kesempatan bagi manajer untuk melakukan *rent extraction*, yakni tindakan manajer yang tidak memaksimalkan kepentingan pemilik. Hal ini dapat berupa penyusunan laporan keuangan yang agresif, pengambilan sumber daya atau aset perusahaan untuk kepentingan pribadi”.

Kerugian dari tindakan pajak agresif yaitu:

1. “Kemungkinan perusahaan mendapat sanksi/ penalti dari fiskus pajak, dan turunnya harga saham perusahaan.
2. Penurunan harga saham dikarenakan pemegang saham lainnya mengetahui tindakan pajak agresif yang dijalankan manajer dilakukan dalam rangka *rent extraction*.
3. Rusaknya reputasi perusahaan akibat audit dari fiskus pajak”.

2.1.7.7 Pengukuran Agresivitas Pajak

Pengukuran ini ada 5 proksi yang bisa digunakan untuk menghitung tingkat agresivitas pajak. Yaitu:

1. *Effective Tax Rate* (ETR)

Mengacu pada penelitian (Lanis & Richardson, 2012), *Effective Tax Rate* (ETR) adalah efektivitas pembayaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan, yang digunakan untuk merefleksikan perbedaan-perbedaan antara perhitungan laba buku dengan laba fiskal. Tarif pajak ETR dihitung dengan cara membagi total beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak.

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

2. *Cash Effective Tax Rate* (CETR)

Digunakan karena diharapkan dapat mengidentifikasi keagresifan agresivitas pajak perusahaan yang dilakukan dengan menggunakan perbedaan tetap maupun perbedaan temporer (Imam F, 2016) Rumus untuk menghitung CETR disini adalah:

$$CETR = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

3. *Book Tax Difference ManzonPlesko* (BTD_MP) dan *Book Tax Difference Desai-Dharmapala* (BTD_DD)

digunakan untuk mendapatkan trigulasi, menurut Desai dan Dharmapala (2006) dalam Alfiyani dan Hery (2013). Rumus sebagai berikut:

$$BTD_{MPit} = \frac{Y_{it}^S - Y_{it}^T}{\text{Total Asset}_{it-1}}$$

Dan

$$BTD_{DDit} = \beta_1 TA_{it} + \mu_i + \varepsilon_{it}$$

4. *Tax Planning* (TAXPLAN)

Digunakan untuk menggambarkan tingkat subsidi pajak yang digunakan didalam suatu perusahaan (Yin dan Cheng 2004) dalam Alfiyani dan Hery (2013).

$$TAXPLAN_{it} = \frac{\sum_t^{t-2} [PTI * 28\% - \text{Current portion of total tax expense}]: 3}{Ending Asset_t}$$

Dari beberapa pengukuran di atas, metode pengukuran agresivitas pajak yang akan digunakan penulis yaitu ETR karena dari beberapa penelitian sebelumnya banyak yang menggunakan ETR untuk mengukur agresivitas pajak, Selain itu ETR mempunyai tujuan untuk mengetahui jumlah presentase perubahan pembayaran pajak yang sebenarnya terhadap laba komersial yang diperoleh (Donny, 2018).

Dengan kriteria mengacu berdasarkan pada PPh 17 ayat (2), tarif pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia yang dimulai pada tahun pajak 2010-2019, tarif pajak penghasilan wajib badan ditetapkan 25%. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 dimana tarif PPh Badan untuk wajib pajak badan dari 25% turun menjadi 22%.

Namun pada tanggal 29 Oktober 2021, Pemerintah secara resmi mengundang Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) menjadi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021. Hal ini pemerintah telah menetapkan tarif pajak PPh Badan naik sebesar 22% untuk tahun pajak 2022 dan seterusnya.

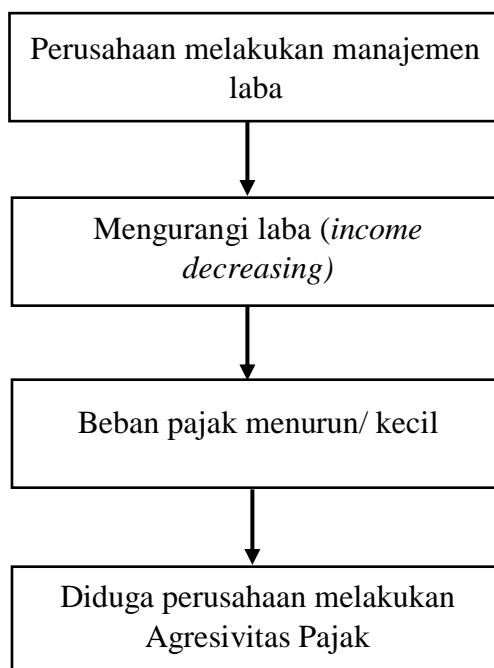
2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Manajemen Laba terhadap Agresivitas Pajak

Manajemen laba merupakan suatu cara dalam menyajikan informasi laba kepada publik yang sudah disesuaikan dengan kepentingan dari pihak manajer itu sendiri atau menguntungkan perusahaan dengan cara menaikkan ataupun menurunkan laba perusahaan, Suyanto dan Supramono, (2012) dalam Imam Fadli, (2016).

Perusahaan melakukan manajemen laba dengan mengurangi jumlah laba (*income decreasing*) yang dilaporkan untuk menurunkan pendapatan kena pajak sehingga perusahaan dapat mengurangi atas beban pajak. Semakin agresif perusahaan yang melakukan manajemen laba maka beban pajak semakin kecil sehingga terjadi agresivitas pajak (Lucy Tania Yolanda Putri, 2014).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Shelly Novitasari (2017), Imam Fadli (2016), menyatakan bahwa manajemen laba berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Namun penelitian yang dilakukan oleh Annisa Nurul Ikhwa dan Ardan Gani Asalam (2021), Mar Atun Kariimah & Rini Septiowati (2019), dan Lucy Tania Yolanda Putri (2014) menyatakan manajemen laba tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Kerangka pemikiran pengaruh manajemen laba terhadap agresivitas pajak dapat dilihat pada **Gambar 2.1**



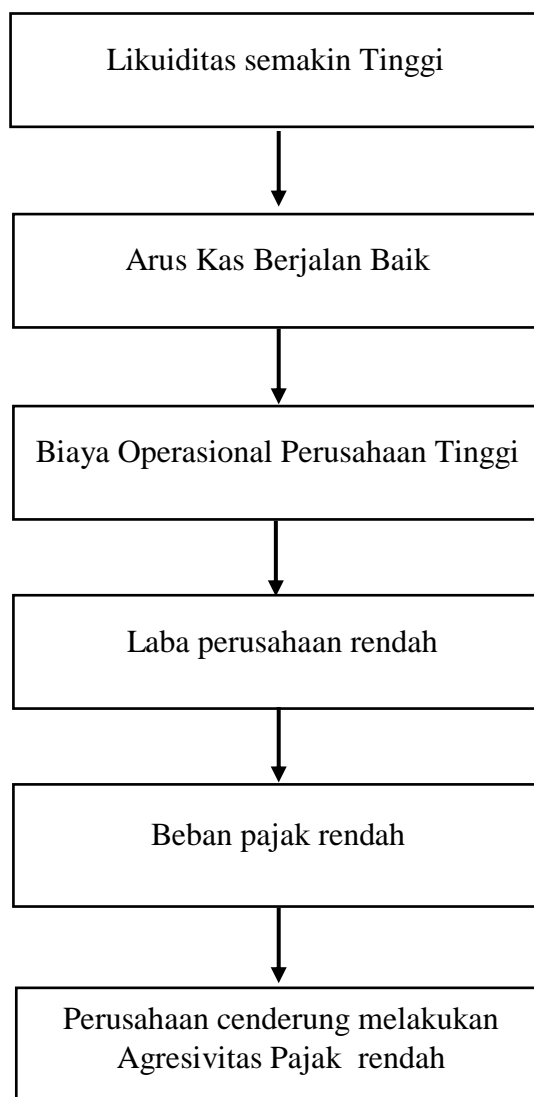
Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran Pengaruh Manajemen Laba terhadap Agresivitas Pajak

2.2.2 Pengaruh Likuiditas terhadap Agresivitas Pajak

Likuiditas mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek (Hanafi dan Halim, 2016 dalam Nesa Apriliana, 2022). Perusahaan yang memiliki tingkat likuiditas yang tinggi, maka dapat dikatakan arus kas perusahaan tersebut berjalan dengan baik. Karena perusahaan mampu memenuhi kewajiban jangka pendek sesuai jatuh tempo. Dengan adanya pengelolaan kas yang baik hal ini menandakan kompleksnya kegiatan operasional perusahaan, sehingga biaya operasional perusahaan menyebabkan rendahnya laba yang di peroleh perusahaan. Semakin rendah laba yang diperoleh maka beban pajak

yang dibayarkan semakin kecil karena beban pajak pada tahun tersebut rendah maka perusahaan mengurangi tindakan agresivitas pajak (Awaloedin, 2022).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mar Atun Kariimah & Rini Septiowati (2019), Donny Indradi (2018), Imam Fadli (2016), menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Namun penelitian yang dilakukan oleh Diah Amalia (2021), Lilis Karlina (2021), Kwanika Kaulika P Putri, Reza Febriana dkk (2020), Riri Muliarsi & Angga Hidayat (2020), dan Lucy Tania Yolanda Putri (2014) menyatakan bahwa likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Kerangka pemikiran pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak dapat dilihat pada **Gambar 2.2**.



Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran Pengaruh Likuiditas
terhadap Agresivitas Pajak

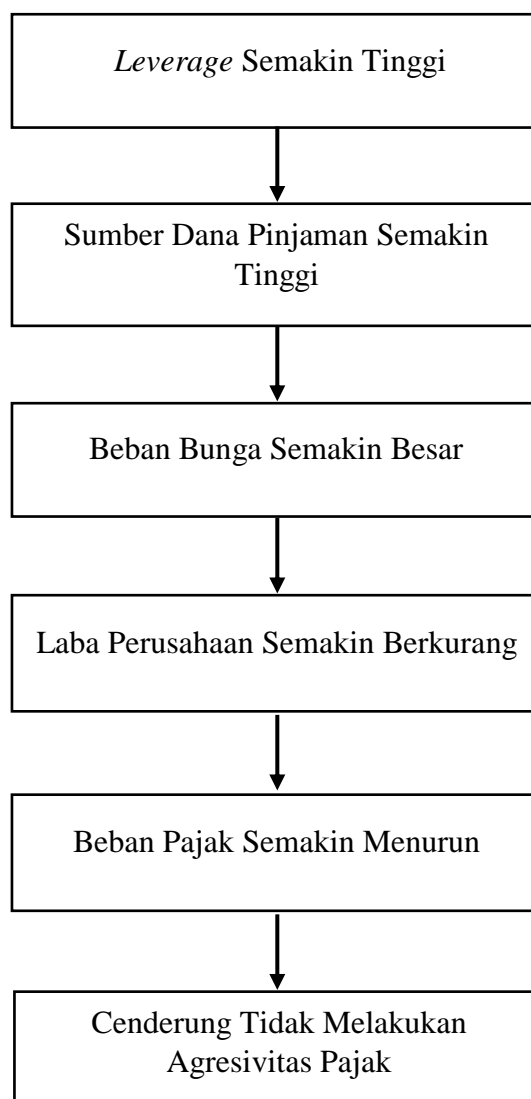
2.2.3 Pengaruh Leverage terhadap Agresivitas Pajak

Leverage merupakan rasio yang menunjukkan besarnya modal *eksternal* yang digunakan dalam membiayai aktivitas operasi perusahaan. Apabila perusahaan memiliki sumber dana pinjaman tinggi, maka perusahaan akan membayar beban bunga yang tinggi kepada kreditur. Dimana beban bunga merupakan pengurang laba tahun berjalan yang akan berdampak pada pengurangan

beban pajak dalam satu periode berjalan (Brigham dan Houston, 2010:141 dalam Denny Wijaya *et. al.*, 2019). Hal ini akan mempengaruhi beban pajak perusahaan dimana perusahaan akan tidak agresif terhadap pajak (Wijaya *et. al.*, 2019).

Leverage menandakan seberapa besar aset yang dimiliki perusahaan berasal dari modal pinjaman perusahaan. Selain itu, rasio *leverage* menunjukkan besarnya utang yang dimiliki oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya, dimana dalam penggunaannya menimbulkan biaya tetap bagi perusahaan (Mayangsari, 2015 dalam Wijaya *et. al.*, 2019).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Diah Amalia (2021), Lilis Karlina (2021), Riri Muliawati & Angga Hidayat (2020), dan Imam Fadli (2016) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Namun penelitian yang dilakukan oleh Annisa Nurul Ikhwa & Ardan Gani Asalam (2021), Kwanika Kaulika P Putri, Reza Febriana dkk (2020), Denny Wijaya dan Akhmad Saebani (2019), Thomas Sumarsan goh, Jatongan Nainggolan, & Edison Sagala (2019), menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Kerangka pemikiran pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak dapat dilihat pada **Gambar 2.3**.



Gambar 2.3
Kerangka Pemikiran Pengaruh *Leverage* terhadap Agresivitas Pajak

2.3 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

- H1 : Manajemen Laba berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak
- H2 : Likuiditas berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak
- H3 : *Leverage* berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak